

**KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**Helen Tina BR Lumban Batu<sup>1</sup>, Diki Zukriadi<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,  
Universitas Putera Batam

Email Correspondensi : [pb220710013@upbatam.ac.id](mailto:pb220710013@upbatam.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi situasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah dilakukan renegotiasi di bawah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Perjanjian ini menyoroti poin-poin penting tentang kodifikasi hukum administratif yang sebelumnya sulit karena penerapan yang tidak konsisten di berbagai lembaga pemerintah, lembaga, dan dewan. Diharapkan UU No. 30 tahun 2014 akan memperkuat keberadaan PTUN saat ini dalam penegakan hukum administratif dan menjamin kepatuhan hukum bagi masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mencakup hukum sejarah terkait UU No. 30 2014, perundang-undangan, dan asas-asas hukum. Dan melalui analisis ini, studi ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan batasan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No. 30 tahun 2014 tidak hanya memperkuat hak-hak PTU dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga meningkatkan pengaruh mereka. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan PTUN kerangka hukum yang lebih akurat dan kuat untuk menyelesaikan sengketa administratif, meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan efisiensi dalam administrasi pemerintah. Akibatnya, Undang-Undang menjadi batu penjurur penting untuk strategi penegakan hukum administrasi negara bagian, menjamin pertahanan hak-hak warga dan mendorong pemerintah yang lebih bertanggung jawab dan responsif.

Kata kunci : UU Nomor 30 tahun 2014; Politik Hukum Administrasi; peran PTUN

**Abstract**

This study aims to clarify the situation of the State Enterprise Justice (STJ) after renegotiations under the Law No. 30 of 2014 on Government. The agreement highlights important points on the codification of administrative law that was previously difficult due to inconsistent implementation in various government agencies, institutions, and councils. It is expected that Act No. 30 of 2014 will strengthen the current presence of the PTUN in the enforcement of administrative law and guarantee compliance with the law for the general public. This study uses a normative jurisprudential method that covers historical law related to Act No. 30 2014, laws, and the foundations of law. And through this analysis, the study aims to understand the basic principles and limits of the regulation of the laws mentioned above. The results of the research show that the implementation of Act No. 30 of 2014 not only strengthened the rights of the PTU in the Indonesian legal system, but also increased their influence. The Act No. 30 of 2014 provides a more accurate and robust legal

framework for resolving administrative disputes, improving accountability, openness, and efficiency in government administration. As a result, the Act became an important cornerstone of the state administration's law enforcement strategy, guaranteeing the defence of citizens' rights and encouraging more responsible and responsive governments.

Keywords : Act No. 30 of 2014; Administrative Law Policy; The Role of UNP

## **PENDAHULUAN**

Salah satu komponen yang paling penting dari sistem politik Indonesia adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan administratif antara negara dan rakyat. PTUN dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, hak individu, dan integritas prosedur administrasi nasional yang dianggap terancam. Dalam konteks hukum administratif, prinsip yang paling penting adalah kode hukum alam yang diimplementasikan oleh banyak lembaga pemerintah, sehingga sulit bagi warga untuk memahami dan menerapkannya secara efektif.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan diperkenalkan sebagai langkah penting dalam mengatasi tantangan ini dengan mendefinisikan kembali beberapa undang-undang administrasi yang sebelumnya tidak jelas. UU ini memberikan bimbingan hukum yang lebih jelas dan lebih ringkas, yang diharapkan akan memperkuat kemampuan PTUN untuk menegakkan undang-undang administrasi hukum nasional. Sebagai bagian dari sistem reformasi administrasi, PTUN mempertahankan pendekatan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Studi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum, latar belakang, dan hukum dasar-dasar yang melengkapi UU No. 30 tahun 2014. Melalui analisis teori dan praktik hukum terkait, studi ini bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana UU No. 30 2014 mempengaruhi hak dan kepentingan PTUN dalam sistem hukum Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan untuk memahami bagaimana UU No. 30 2014 berkontribusi pada peningkatan kepatuhan hukum, akuntabilitas, dan efisiensi dalam menangani administrasi data sensitif.

Menurut UU No. 30 tahun 2014, PTUN diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat umum. UU ini tidak hanya mendukung keberadaan PTUN, tetapi juga berfungsi sebagai dasar penting untuk pengembangan politik hukum di Indonesia, dengan tujuan membangun pemerintahan yang lebih berfokus pada kepentingan publik dan kurang arbitrasi. Studi ini diharapkan

memiliki dampak positif pada pemahaman tentang dinamika administrasi hukum Indonesia dan peran PTUN dalam penegakan hukum administrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut yuridis normatif, yang melibatkan analisis hukum tentang norma dan peraturan, undang-undang yang berkaitan dengan kasus-kasus khusus, dan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta risiko dan kebijakan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konteks yang relevan. Studi ini didasarkan pada ulasan literatur hukum, termasuk buku, jurnal, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian. Pertama, dilakukan analisis mengenai teks dan implikasi UU No. 30 2014 tentang PTUN, menekankan prinsip-prinsip hukum yang mendasari negosiasi dan pelaksanaan perjanjian yang disebutkan di atas. Selain itu, studi hukum dilakukan untuk memahami konteks dan kebijakan hukum yang mendasari UU yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, studi hukum dilakukan untuk memahami konteks dan kebijakan hukum yang mendasari UU yang disebutkan sebelumnya. Studi ini juga bertujuan untuk memperjelas interpretasi dokumen-dokumen hukum dan mungkin untuk mengklarifikasi kesalahpahaman tentang hukum administrasi nasional dan praktek PTUN untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Penilaian efektivitas UU No. 30 Tahun 2014 dalam mengevaluasi kinerja PTUN dan membandingkannya dengan peraturan sebelumnya juga merupakan bagian dari metodologi penelitian ini. Mengingat hal ini, diharapkan bahwa studi ini akan memberikan informasi yang jelas tentang tujuan dan implikasi UU No. 30 tahun 2014 sehubungan dengan PTUN dan sistem hukum administratif Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran UU No. 30 Tahun 2014 dalam Pengembangan Politik Hukum Administrasi Evaluasi dampak UU ini terhadap sistem administrasi pemerintahan Indonesia.**

Penilaian UU No. 30 tahun 2014 tentang sistem administrasi pemerintah Indonesia mengungkapkan beberapa aspek penting yang perlu ditangani. Pertama, mengenai pemeliharaan efisiensi administrasi dan birokrasi, UU yang disebutkan di atas telah memberikan pedoman khusus untuk mengurangi beban administratif dan meningkatkan efektivitas administrasi dalam pembelian pemerintah. Penggunaan teknologi informasi

telah menjadi lebih maju untuk mempercepat proses administrasi, sementara pembuatan peraturan yang lebih komprehensif telah dilakukan untuk memperjelas kebijakan pemerintahan. Namun, masih ada tantangan dalam menerapkan kebijakan ini secara konsisten di semua tingkat pemerintah, terutama di wilayah ini.

Selain itu, dalam hal perlindungan hak-hak warga negara dan peningkatan transparansi, UU No. 30 tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak warga negara dalam kaitannya dengan administrasi pemerintah. Mengadopsi prinsip-prinsip transparansi telah menghasilkan tantangan, terutama dalam hal akses publik ke informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, selalu ada kesempatan untuk perbaikan lebih lanjut, khususnya dalam mengatasi hambatan praktis untuk akses informasi yang efektif dan meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pengiriman proposal.

Selain itu, dalam hal perlindungan hak-hak warga negara dan peningkatan transparansi, UU No. 30 tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak warga negara dalam kaitannya dengan administrasi pemerintah. Mengadopsi prinsip-prinsip transparansi telah menghasilkan tantangan, terutama dalam hal akses publik ke informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, selalu ada kesempatan untuk perbaikan lebih lanjut, khususnya dalam mengatasi hambatan praktis untuk akses informasi yang efektif dan meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pengiriman proposal.

UU No. 30 Tahun 2014 telah memberikan panduan penting untuk memperkuat kebijakan hukum dan administrasi Indonesia. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal implementasi efektif dari strategi ini di semua tingkat pemerintah. Oleh karena itu, perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan implementasi, memahami masalah yang muncul, dan memastikan bahwa administrasi pemerintah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

### **Pengaruh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap kewenangan dan peran PTUN dalam sistem hukum administrasi di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan memiliki implikasi yang signifikan terhadap risiko dan kebijakan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem hukum administratif Indonesia. Salah satu tujuan utama adalah untuk menyediakan

PTUN dengan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terstruktur untuk membantu mereka dengan tugas administrasi mereka. Perjanjian ini menjelaskan prosedur, pedoman, dan metode untuk menangani isu-isu administratif sensitif. Ini juga memberikan lebih banyak kejelasan bagi PTU ketika menangani masalah yang berkaitan dengan tindakan administrasi Pemerintah.

Selain itu UU No. 30 Tahun 2014 memberikan panduan mengenai mandat PTUN dalam menegakkan prinsip-prinsip administrasi yang sehat, seperti transparansi, akuntabilitas, dan penilaian yang baik. Ini memperkuat peran PTUN sebagai organisasi yang tidak hanya mewakili hierarki administrasi tetapi juga bertindak sebagai penjaga gerbang untuk kebijakan dan praktik administrasi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, PTUN diharapkan dapat secara aktif melindungi hak-hak rakyat dan kepentingan masyarakat umum dalam konteks administrasi pemerintah. UU No. 30 Tahun 2014 memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan PTUN di bidang manajemen informasi sensitif. Perjanjian ini memberi PTUN lebih banyak fleksibilitas untuk menangani berbagai jenis file administratif, termasuk file yang rumit dan kontroversial. Selain itu, UU ini juga dapat menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses sengketa administratif, termasuk mediasi dan negosiasi, yang dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi penjualan staf PTUN.

## **KESIMPULAN**

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah telah menetapkan peran penting dalam memperkuat sistem administrasi pemerintah Indonesia melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan perlindungan hak-hak warga. Selain itu UU ini memperjelas dan memperkuat kewajiban hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan memberikan lebih terstruktur dan transparansi dalam menangani masalah administrasi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, UU ini tidak hanya membantu PTUN dalam mempertahankan hukum administrasi yang lebih adil tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Meskipun demikian, masih ada tantangan tertentu dalam menerapkan hukum secara konsisten di semua tingkatan pemerintah, yang membutuhkan lebih banyak upaya untuk memastikan bahwa administrasi pemerintah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan mempertahankan moral. UU No. 30 Tahun 2014 merupakan langkah penting dalam pengembangan kebijakan

administrasi hukum Indonesia, memungkinkan pemerintah nasional untuk memprioritaskan pemerintahan negara yang lebih bertanggung jawab dan responsif sehubungan dengan kebutuhan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Sumeleh, Elisa JB. "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum* 5.9 (2017).
- Why is Judicial Independence Important to You?", <http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general>, diakses tanggal 27 Juli 2017
- "New-Delhi Standards 1982-New Delhi Code of Minimum Standards of Judicial Independence", <https://www.jiwp.org/new-delhi-declaration>, diakses tanggal 2 Agustus 2017.
- Prahastapa, Anita Marlin Restu, Lapon Tukan Leonard, and Ayu Putriyanti. "Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): 1-18.
- Harjiyatni, Francisca Romana, and Suswoto Suswoto. "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.4 (2017): 601-624.
- <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/551-catatan-evaluasi-undang-undang-no-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-uu-ap-2.htm>
- Hood, Christopher, at al. (Ed.), *Controlling Modern Government Variety, Commonality and Change*, Edward Elgar Publishing, Inc., Cheltenham, Massachusetts, 2004.
- Simanjuntak, Enrico, "Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No. 30 Tahun 2014", *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Press, Yogyakarta, 2014